

## **POLITIK DEMOKRASI PENDIDIKAN ISLAM (Dampak Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia terhadap Akses Layanan dan Mutu Pendidikan)**

**Muhammad Abdullah**

Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia  
*muhammad.abdullah1010@gmail.com*

**ABSTRACT:** *How the political impact of Islamic education democracy in Indonesia and Malaysia on service access and quality of education. The method used in this research is library research. To collect data the author uses the documentation method. The data analysis technique used in this case is content analysis. Because the development of educational institutions cannot be separated from government policy factors as policy makers. How the policies formulated can advance education and provide access to quality education services and quality. Because education is the most influential sector in the progress of a country. The direction of the goal of national education is to develop a variety of human potential optimally so that an advanced civilizational order is formed in a nation. While Islamic education is part of the national education subsystem. Most Muslim-populated countries, such as Indonesia and Malaysia, Islamic education is an integral part of the nation which helped tread the nation's journey from the colonial period to the independence of the two countries. The role of Islamic education also colors how the democratic politics of education has an impact on the service access sector and the quality of education for the countries of Indonesia and Malaysia.*

**Keywords:** *Educational Democracy Politics, Islamic Education*

### **PENDAHULUAN/INTRODUCTION**

Pendidikan merupakan sebuah wujud nyata ikhtiar kolektif manusia dalam memanfaatkan potensi akal yang diberikan tuhan kepadanya demi usaha mempertahankan hidup di bumi sekaligus menjadi *kehalifah*-Nya yang dilakukan secara turun menurun dari generasi pertama manusia di bumi hingga sampai generasi sekarang. Signifikansi kebutuhan pendidikan merupakan hal yang urgen dan mendasar yang tak terbantahkan bagi manusia dalam menjalani kehidupan dan melestarikan alam semesta ini. Islam menempatkan pendidikan pada derajat yang tinggi sebagai bekal manusia agar selalu *kaffah* sebagai hamba (*'abd*) dan sebagai pemimpin (*kehalifah*) Allah di bumi.<sup>1</sup> Pendidikan juga berperan sebagai kemajuan peradaban sebuah bangsa. Oleh sebab itu deternimasi kemajuan sebuah bangsa ditentukan dari sektor kualitas pendidikan itu sendiri, bagaimana pendidikan dikelola dan dijakankan dengan sebaik mungkin.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abudin Nata. *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 26.

<sup>2</sup> Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam* (Rajawali Press, Jakarta, 2013), 73. Lebih lanjut urgensitas pendidikan bagi suatu bangsa adalah sebagai pilar pembangunan peradaban Negara. Pada era perekonomian bebas ASEAN sekarang adalah merupakan hal yang mutlak menjadi penentu daya saing bangsa yang ditentukan dengan memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Pendidikan berperan menjadi jembatan bagi generasi bangsa dalam menggapai capaian tiga unsur daya saing. Maka pendidikan nasional merupakan sistem yang diselenggarakan oleh suatu negara

Dalam lingkup kenegaraan, pemerintah bertanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan, hal tersebut hampir terjadi di berbagai belahan Negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual pendidikan diselenggarakan tidak lain dalam rangka mempertahankan dan melestarikan eksistensi nilai-nilai luhur budaya bangsa dari masa ke masa.<sup>3</sup> Sistem pendidikan yang dikembangkan di berbagai Negara pada intinya tidak akan lepas dari politik.<sup>4</sup> Secara teoritis Negara yang menyelenggarakan sistem pendidikan pada mulanya bersumber dari dorongan kuat masyarakat akan peradaban yang lebih baik yang kemudian secara legalitas disahkan oleh pemerintah sebagai konsensus nasional dalam suatu Negara. Berdiri dan majunya pendidikan yang diselenggarakan harus mempertimbangkan aspek legitimasi pada aspek legalitas dari pemerintah agar tetap *survive* dan diterima baik di tengah-tengah masyarakat. Maka pengakuan politik menjadi salah satu indikator diterimanya pendidikan adalah sebuah legalitas formal lembaga pendidikan.

Secara parsial lembaga pendidikan yang berkembang di sebuah Negara akan berdampak pada karakteristik bangsa itu pula, karena perilaku masyarakat yang berampak pada pembentukan karakteristik tersebut, sehingga hubungan lembaga pendidikan dengan kekuatan proses politik menjadi perlu dikaitkan. Hubungan tersebut merupakan realitas empirik yang telah terjadi dalam sebuah Negara. Munculnya campur tangan kebijakan pemerintah pada pendidikan memberikan warna tersendiri pada karakteristik pendidikan yang diselenggarakan dalam Negara.<sup>5</sup> Maka keberhasilan pendidikan dalam suatu Negara sebagian ditentukan oleh kebijakan pemerintah pada sektor pendidikan. Bagaimana politik kebijakan publik pada pendidikan akan memberikan pengaruh hasil yang dapat menjadikan pendidikan semakin maju ataupun terbelakang.

Implementasi sistem pendidikan Islam di beberapa lembaga-lembaga pendidikan memiliki ragam perbedaan menjadikan ciri khas antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.<sup>6</sup> Letak perbedaannya dapat dilihat dari bagaimana sistem yang dijalankan oleh masing-masing lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia mempunyai peran strategis dan menjadi bagian integral dan mempunyai peran penting dalam sistem pendidikan nasional. Urgensi pendidikan Islam tersebut tidak sebagai bagian dalam perjalanan pendidikan nasional, akan tetapi pendidikan Islam juga memberikan warna serta landasan dalam menentukan arah tujuan pendidikan nasional.

Hal serupa terjadi di Negara Malaysia yang menempatkan posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan di Malaysia. Negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam tersebut diakui dunia Islam karena kiprah keislamannya. Proses Islamisasi di Malaysia tersebut didahului oleh peran pedagang

---

kebangsaan atau negara nasional dalam rangka mewujudkan nasib bangsa itu sendiri. Lihat pada Redja Mudyahardjo. *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 50-51.

<sup>3</sup> Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 305.

<sup>4</sup> H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 2.

<sup>5</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

<sup>6</sup> Ahmad Amrullah *et.al.*, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), xi.

*muslim* dalam menyebarkan agama Islam serta faktor pendidikan sebagai kaderisasi nilai-nilai keislaman. Masuknya Islam di Malaysia yang dibawa oleh pedagang *Muslim* terjadi bersama Indonesia yang kemudian Islam menyebar pesat yang berdampak pada pesatnya pendidikan Islam di dua Negara tersebut. Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa kesamaan latar belakang, diantaranya adalah: sama-sama memiliki penduduk dengan jumlah mayoritas pemeluk agama Islam,<sup>7</sup> pernah merasakan perjuangan kemerdekaan melawan bangsa Eropa, serta memiliki persamaan dalam tahap dan dinamika perkembangan pendidikan Islam. Hal tersebut dirasa cukup menarik dalam penelitian perbandingan pendidikan Islam untuk dikaji lebih dalam bagaimana dinamika perkembangan politik demokrasi pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia serta bagaimana implikasinya terhadap peningkatan akses layanan dan mutu pendidikan di kedua Negara tersebut.

## **METODE/METHOD**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam hal ini adalah analisis isi. Untuk menjaga ketepatan pengkajian dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION**

### **A. Wajah Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia**

Demokrasi dalam term politik diartikan sebagai kekuasaan tunggal dikendalikan ditangan rakyat, keberpihakan pada rakyat dan bukan atas dasar kekuasaan pemimpin. Terminologi demokrasi pendidikan kemudian menjadi sandaran pengelolaan sistem pendidikan yang berimplikasi pada kepentingan kebutuhan rakyat.<sup>8</sup> Dalam ranah pendidikan, demokrasi didasarkan pada implementasi pendidikan yang menghargai perbedaan, persamaan dan kebebasan peserta didik dalam rangka menuju tujuan dari pendidikan adalah mengoptimalkan serta mengembangkan diri peserta didik secara *kaffah* sebagaimana amanah dalam Undang-undang.<sup>9</sup>

Demokrasi pendidikan yang menilai adanya beberapa problematika dalam pendidikan seperti pembodohan, pendidikan elitis dan beberapa problematika lain yang intinya merugikan peserta didik sebagai bagian kecil dari rakyat. Seyogyanya kebijakan pendidikan memihak sepenuhnya pada

---

<sup>7</sup> Munculnya prosentase angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk Malaysia identik dengan warga Muslim. Dapat dipahami bahwa di Malaysia yang berbangsa Melayu-Islam dan Islam sendiri merupakan jati diri bangsa Melayu di Malaysia, lihat Ahmad Munawar Ismail et al, "Islam dalam Pendidikan dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu di Malaysia", (*Jurnal Hadhari, Special Edition*, 2012), 4.

<sup>8</sup> Richard M. Ketchum. *Demokrasi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Futeh Printika, 2004), 20

<sup>9</sup> Abdul Munir Mulkhan. *Paradigma Intelektual Muslim* (Yogyakarta: Sypress, 1993), 183

kepentingan peserta didik,<sup>10</sup> sepertihalnya pelaksanaan Ujian Nasional yang dilakukan dianggap pembodohan peserta didik karena dianggap tidak tepat sasaran dan tujuannya. Mengahalalkan segala cara demi kelulusan sekolah dan tidak jarang ditemukan setiap elemen sekolah baik kepala sekolah, guru dan siswa melakukan tindakan kecurangan dalam memberikan jawaban dalam soal Ujian Nasional tersebut. Jadi berdasarkan kasus tersebut maka demokrasi pendidikan seyogyanya memfasilitasi dan memberikan hak yang setara sesuai batasan dan minatnya pada seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi untuk menuju pendidikan yang berkualitas.<sup>11</sup>

### 1. Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Indonesia

Konteks pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari faktor pengetahuan dan kuasa (*knowledge and power*). Pendidikan merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan dan kekuasaan berfungsi mengatur dan menentukan peradaban bangsa di Indonesia. Dengan demikian proses dalam pengelolaan pendidikan dan penanaman nilai-nilai pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukti nyata keterkaitan antara Negara dengan pendidikan tertuang dalam UUD 1945 sebagaimana pemerintah dalam hal ini adalah bertugas sebagai penyelenggara pendidikan yang dituntut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sesuai dalam UUD 1945 pasal 31 yang secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pengajaran. Hal tersebut membuktikan bahwa Negara berkewajiban mengelola segala kebutuhan pendidikan warga Negara, demi terciptanya kehidupan bangsa yang bermartabat dan beradab.

Sejarah muncul dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan kebijakan dari masa kemasa dengan turut mewarnai perkembangan hidup manusia. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti Madrasah merupakan bagian dari progresif-responsif umat Islam, yang tidak hanya bersifat dependensi pada kebijakan pemerintah kolonial Belanda, melainkan pada masa itu kasus yang sering terjadi adalah marginalisasi pendidikan agama Islam yang dijadikan sebagai sasaran kesalahan ketika menghadapi arus perkembangan kristenisasi yang berdalih pada alasan ketertiban dan keamanan.<sup>12</sup> Pada realitasnya perkembangan Madrasah di berbagai daerah di Indonesia merupakan hasil kerja keras para tokoh pendidikan Islam tanpa adanya dukungan dan legitimasi pemerintah. Kejadian di masa kolonial Belanda tidak terjadi pada masa pemerintahan Jepang. Pemerintahan Jepang lebih membiarkan

---

<sup>10</sup> Louise Anderson Allen. "The Moral Life of Schools Revisited: Preparing Educational Leaders to 'Build a New Social Order' for Social Justice and Democratic Community" (Jurnal International Journal of Urban Education Leadership: (IJUEL) Vol.1, 2006), 1. Lebih lanjut menurut H.A.R. Tilaar prinsip dalam demokrasi pendidikan setidaknya terdiri dari beberapa komponen berikut, diantaranya adalah: *Pertama*, pengakuan atas hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan, *Kedua*, suatu sistem pendidikan yang terbuka, *Ketiga*, pendidikan untuk seluruh rakyat dan *Keempat*, tujuan pendidikan adalah manusia yang cerdas dan bermoral. Lihat pada H.A.R. Tilaar. *Kalaedoskop Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kompas, 2012), 1110.

<sup>11</sup> H.A.R. Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 7.

<sup>12</sup> Maksum. *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 63.

Madrasah-madrasah untuk kembali diaktifkan dan dibuka yang sebelumnya ditutup. Akan tetapi politik pemerintahan Jepang waktu itu masih eksis mengontrol Madrasah-madrasah yang beroperasi tersebut yang berpotensi dalam melakukan pemberontakan dan perlawanan pada pemerintahan Jepang.<sup>13</sup>

Masa orde lama Madrasah semakin mendapatkan peran dalam pemerintahan. Pada tahun 1946 pemerintah mendirikan Departemen Agama yang menyeragamkan nama, jenis dan tingkatan Madrasah pada jenjangnya. Kebijakan yang dimunculkan adalah segmentasi Madrasah menjadi dua bagian. *Pembagian pertama* adalah Madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama sebanyak 30% dan pelajaran umum 70%. *Pembagian kedua* adalah Madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama murni 100% yang bernama Madrasah Diniyah.<sup>14</sup> Kemudian pada masa pemerintah Orde Baru adalah kebijakan pemerintah berupa program Wajib Belajar 9 Tahun, dan akhirnya pada tahun 1970 kebijakan mengubah Madrasah Diniyah bertransformasi menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI). Namun nama Madrasah Diniyah yang sebagian besar mengajarkan pelajaran agama sampai saat ini masih tetap berjalan tidak ada perubahan. Dinamika perkembangan Madrasah sampai dekade saat ini masih tetap berdiri dan tidak ada perubahan kebijakan, sampai kemudian pada perkembangan legitimasi Madrasah yang berada dalam payung perlindungan dan kontrol Kementerian Agama.<sup>15</sup>

Politik pemerintah selanjutnya pada pendidikan Islam yang melahirkan beberapa kebijakan termasuk pada madrasah, diantaranya adalah:<sup>16</sup> Pengakuan Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal, adanya penyetaraan status Negeri pada madrasah, penyetaraan status antara Madrasah dengan sekolah umum, munculnya UU Nomor 2 tahun 1989 hingga muncul kembali UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia.

Namun disisi lain tataran politik demokrasi dalam ranah pendidikan di Indonesia masih belum selesai dan masih mengalami banyak krisis konseptual adalah permasalahan tentang dikotomi pendidikan<sup>17</sup> Secara diametral yang membedakan antara pendidikan ilmu agama dengan umum.<sup>18</sup> Akibatnya berimplikasi pada pemisahan antara lembaga-lembaga dalam naungan Kementerian Agama bagi ilmu agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada ilmu umum. Menurut Azyumardi Azra dengan adanya dikotomi dalam pendidikan di Indonesia menimbulkan lembaga pendidikan Islam semakin dijauhi oleh masyarakat karena kurang

---

<sup>13</sup> Maksum. *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya*, 114-116.

<sup>14</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Endiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 108.

<sup>15</sup> Musyriyah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 61.

<sup>16</sup> Maksum. *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya*, 130-131.

<sup>17</sup> Menurut Syafi'i Maarif munculnya dikotomi dalam sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu indikasi rapuhnya dasar filosofis pendidikan Islam. lihat pada Ahmad Syafi'i Maarif. *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 18.

<sup>18</sup> Ahmad Syafi'i Maarif. *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan*, 18.

diminati. Munculnya stigma dalam masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan Islam lebih menekankan pada dimensi akhirat saja kurang menyentuh pada tataran duniawi.<sup>19</sup>

Sebagaimana menurut Benny Susetyo mengungkapkan bahwa paradigma pendidikan di Indonesia masih terkesan amburadul baik dari segi visi misi maupun tujuannya. Pendidikan dipandang hanya sebagai instrumen kekuasaan politik pemerintah saja. Sehingga yang terjadi pendidikan di Indonesia hanya sebagai robot yang dikendalikan oleh pemerintah sebagai pengendali.<sup>20</sup> Bukti otentik adanya permainan panggung politik pemerintah adalah adanya reformasi kurikulum tiap terjadi perubahan menteri, adapun beberapa kurikulum yang pernah diganti diantaranya adalah kurikulum sejak tahun 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 sampai kurikulum 2013 sekarang.<sup>21</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik demokrasi pendidikan di Indonesia masih belum maksimal. Apabila dilihat tujuan dari demokrasi pendidikan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) maka dalam hal ini adalah peran peserta didik. HAM sejatinya menuntut adanya penyelenggaraan pendidikan yang transparan, inklusif, yang tidak memihak pada masalah kesenjangan siswa baik dari lingkup perekonomian, ras, suku, budaya. Namun yang terjadi peran politik pemerintah yang menonjol dengan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan asas demokrasi pendidikan di Indonesia.

## 2. Politik Demokrasi Pendidikan Islam di Malaysia

Pendidikan Islam di Malaysia secara eksplisit tidak bisa ditetapkan awal munculnya, akan tetapi melihat dapat diidentifikasi dari sejarah munculnya Islam di Malaysia bersamaan dengan aktifitas dari pendidikan Islam menunjukkan bahwa sejarah Malaysia hampir sama dengan Indonesia. Sejarah perkembangan Islamisasi di Malaysia bermula dari jalur perdagangan, yakni melalui jasa para pedagang Negeri Arab dan Gujarat.<sup>22</sup> Bermula pada tahun 1980 progresifitas Islam di Malaysia sangat signifikan yang ditandai dengan banyaknya kegiatan keislaman, dakwah serta kajian Islam oleh tokoh Islam. Selain itu tanda Islamisasi berkembang pesat di Malaysia adalah berkembangnya Masjid dan Surau yang menjadi pusat kajian umat Islam. Masjid berfungsi bukan untuk sarana ibadah, namun Masjid juga digunakan sebagai pusat lembaga pendidikan Islam secara mendalam dan terstruktur baik dari kegiatan maupun aktifitas keagamaan lain yang dijalankan.<sup>23</sup>

Pada tahun 1976 sampai 1986 Malaysia terlihat kembali menunjukkan perhatian yang mendalam pada posisi kejawaan Islam. Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama

---

<sup>19</sup> Azyumardi Azra. *Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 80.

<sup>20</sup> Muklasin. *Demokrasi Pendidikan Dalam Kerangka Pendidikan Nasional (Telaah Pemikiran H.A.R Tilaar)* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 2.

<sup>21</sup> Moh. Yamin, *Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 17.

<sup>22</sup> Andi Aslindah. *Pendidikan Islam di Malaysia: Jenis, Jenjang Kebijakan dan Tujuan Pendidikan* (*Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 18 No. 1 2015), 18.

<sup>23</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Endiklopedi Islam*, 138.

Islam tersebut, mempunyai prinsip bahwa Islam akan selalu dijadikan sebagai sumber kekuatan Malaysia. Wujud perhatian pemerintah terhadap Islam dapat dilihat secara nyata alokasi anggaran yang mengalami kenaikan dalam bidang pendidikan, disamping itu pula pembangunan tempat ibadah seperti masjid dan berbagai institusi Islam mulai menjadi target pengembangan pemerintah.<sup>24</sup>

Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia adalah dalam aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) *Muslim* yang unggul dan professional. Pemerintah Malaysia mendirikan Universitas Islam Internasional (IIUM) yang bekerjasama dengan Arab Saudi dalam hal pendanaan. Adanya IIUM merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menfasliatasi infrstuktur yang dibutuhkan demi perkembangan Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Selain itu realisasi paling umum dari keseriusan ini adalah pembangunan beberapa masjid di beberapa tempat untuk maksimalisasi peribadatan umat Islam. Pembangunan infrastruktur lain dalam bidang dakwah dan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas keberagaman *Muslim* di Malaysia.

Target pengembangan SDM yang dilakukan adalah melalui sistem pendidikan yang dikembangkan di Malaysia banyak mengadopsi dari sistem pendidikan Negara Inggris, karena berdasarkan sejarah Malaysia merupakan Negara bekas jajahan Inggris. Inggris sangat menaruh perhatian dalam sektor pendidikan pada bekas Negara jajahannya. Hal tersebut yang menyebabkan Malaysia maju dalam bidang pendidikan. Inggris banyak memberikan warna dalam dunia pendidikan di Malaysia yang orientasinya pada pengembangan sumberdaya manusia. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia yang sama sekali tidak memperhatikan masalah pendidikan yang hanya mengeruk potensi alam yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penjajahan saja. Akibatnya hampir seluruh Negara-negara bekas jajahan Belanda cenderung terbelakang dalam bidang pendidikan.

Implementasi kurikulum pendidikan Islam di Malaysia hampir serupa dengan pendidikan Islam di Indonesia. Intergrasi kurikulum pendidikan Islam yang mengandung dua kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional pengembangan kurikulum. Kurikulum inti tersebut adalah *tauhid* sebagai dasar pokok sandaran kurikulum. *Kedua*, perintah membaca ayat-ayat Allah yang meliputi tiga macam ayat, yaitu: ayat yang berdasarkan wahyu, ayat yang ada pada diri manusia, dan ayat yang terdapat di alam semesta atau di luar dari manusia.<sup>25</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam di Malaysia banyak mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 1956. Perhatian pemerintah Malaysia sangat baik dalam sektor pendidikan Islam karena menganggap bahwa Islam adalah kekuatan Negara

---

<sup>24</sup> Pendi Susanto. *Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara (Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. IV, No.1, 2015), 79.

<sup>25</sup> Pendi Susanto. *Perbandingan Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, 78.

Malaysia. Maka pendidikan Islam mendapatkan tempat istimewa dalam pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik demokrasi pendidikan di Malaysia berjalan seimbang antara kebutuhan hak asasi manusia dalam hal ini peserta didik dengan sistem politik pemerintahan sendiri.

## **B. Implikasi Politik Demokrasi Pendidikan Islam Terhadap Akses Layanan dan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia**

Pendidikan merupakan sektor utama dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Negara. Intensitas dalam pembaharuan dalam bidang pendidikan harus selalu dilakukan secara sistematis oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan public. Pembaharuan tersebut sepatutnya harus mampu menginterpretasikan tujuan pembangunan nasional.<sup>26</sup> Tujuan tersebut memberikan dorongan kepada pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengarahkan pada sistem pendidikan yang mencerdaskan rakyat, dengan sebutan lain demokrasi pendidikan, yang orientasinya adalah menciptakan masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis merupakan bentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *multikulturalisme* serta *pluralisme* dengan prinsip utama adalah membentuk kader insan yang cerdas dan berakhlak karimah tanpa adanya diskriminasi dan intervensi.<sup>27</sup>

Berangkat dari pernyataan diatas memberikan menggambarkan bahwa demokrasi pendidikan dalam nuansa politik, pemerintah sewajarnya harus selalu memihak pada kebutuhan pengembangan peserta didik daripada menfokuskan pada wewenangnya sebagai otoritas dalam pengambil keputusan kebijakan. Demokrasi pendidikan harus memberikan implikasi positif bagi akses layanan serta mutu pendidikan. Berikut uraian bagaimana perbandingan dari implikasi politik demokrasi pendidikan Islam pada tataran akses layanan dan mutu pendidikan di Indonesia dengan Malaysia.

### **1. Implikasi Politik Demokrasi Pendidikan Islam Terhadap Akses Layanan dan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia**

Pendidikan berperan penting dan strategis dalam pembangunan nasional, untuk mencapai bangsa yang maju, dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan beradab serta berperan aktif dalam kemajuan Negara kesatuan republik Indonesia. Maka sektor pendidikan adalah sarana dalam mengembangkan SDM yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Pembangunan dalam bidang pendidikan harus selalu dimaksimalkan oleh pemerintah, karena pendidikan yang memberikan kontribusi besar dan signifikan dalam upaya membentuk peradaban yang maju dalam sebuah Negara.

---

<sup>26</sup> Suyatno, dkk. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), 17.

<sup>27</sup> Tilaar, H.A.R. *Kalaedoskop Pendidikan Nasional*, 1110.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengupayakan pemenuhan hak setiap warga Negara untuk memperoleh akses layanan pendidikan yang baik sehingga proses pendidikan dapat maksimal dalam menuju pembangunan nasional sesuai amanah dalam Undang-undang yang pada dasarnya Negara bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka hubungan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan selalu menjadi perhatian publik karena pengaruh dari kebijakan tersebut yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan pendidikan kedepannya. Implikasi politik demokrasi pendidikan yang dapat diamati adalah dari segi politik kekuasaan. Upaya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam membuat kebijakan adalah pemerintah mengupayakan beragam cara demi meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia semakin maju, termasuk diantaranya adalah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi seluruh anak bangsa. Dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut telah menghasilkan progress yang baik dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam rangka memperluas akses mutu dan layanan pendidikan adalah melakukan berbagai cara untuk menumbuhkan minat partisipasi masyarakat pada pendidikan sekaligus meminilisir angka kesenjangan pendidikan pada kelompok masyarakat. Pelaksanaan tersebut berupa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pendidikan dan memberikan perhatian penuh pada daerah yang lebih membutuhkan. Namun, kendala yang nyata dalam peningkata pasipasi pendidikan adalah masih ditemukan banyaknya anak-anak usia sekolah dalam kategori kelompok miskin yang tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan bagi mereka.

*Problem solving* yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai upaya menanggulangi anak yang kesulitan dalam membayar sekolah karena tidak mampu atau miskin. BOS diperuntukkan pada seluruh jenjang satuan pendidikan pada pendidikan wajib sembilan tahun agar dapat memberikan kebebasan biaya anak, terutama dari keluarga miskin. Selain itu, pemberian dana BOS dari pemerintah dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses seluas-luasnya bagi anak-anak usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan di Indonesia adalah melalui demokrasi pendidikan Islam pemerintah berupaya meningkatkan kualitas mutu dan relevansi pendidikan karena untuk memenuhi kebutuhan SDM yang cerdas dan bermoral dibutuhkan layanan dan mutu yang berkualitas, antara lain 1) melaksanakan program penambahan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; 2) menyediakan materi bahan ajar untuk para pelajar berupa buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan; 3)

penguatan pendidikan kecakapan hidup dan penataan hubungan lembaga pendidikan dengan dunia industri dan dunia usaha.

## 2. Implikasi Politik Demokrasi Pendidikan Islam Terhadap Akses Layanan dan Mutu Pendidikan Islam di Malaysia

Perkembangan kemajuan pendidikan di Malaysia berperan aktif dalam membentuk peradaban kemajuan bangsa di Negara tersebut. Hal tersebut tidak lepas dari campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan dalam bidang pendidikan. Implikasi politik demokrasi pendidikan Islam di Malaysia dapat dilihat sangat berimbang antara kekuasaan politik dengan demokrasi pendidikan yang mengedepankan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari akar historis kebijakan pengembangan pendidikan Islam di Malaysia yang mengalami progres yang baik sejak kemerdekaan sejak tahun 1957. Regulasi ragam kebijakan yang dalam perundangan dan Syor kerajaan pada bidang pendidikan Islam. Seperti kebijakan yang berlaku pada ordinar tahun pelajaran 1957 yang tidak mendominasi kebutuhan dalam proses pembelajaran agama Islam yang kemudian menyebabkan proses pembelajaran agama Islam tidak berjalan maksimal. Dalam Syor penyata Abdul Rahman Talib juga dituliskan kebijakan-kebijakan terperinci tentang anggaran kebutuhan dalam proses pembelajaran agama Islam sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.<sup>28</sup>

Akses layanan dan mutu pendidikan pendidikan Islam Malaysia dilihat dari kaca mata perbandingan hampir sama dengan akses layanan pendidikan Islam yang dikembangkan di Amerika. Pada tahun 1990 pemerintahan Malaysia mempunyai misi pemerintahan yang jelas terutama dalam bidang pendidikan. Malaysia merupakan kategori masyarakat industrial dan makmur, posisi ini diprediksi hingga sampai tahun 2020. Bahkan sekarang dapat dilihat bagaimana kondisi pendidikan di Malaysia yang lebih maju daripada di Indonesia.<sup>29</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas dasar keperihatinan penuh dari pemerintah dalam mengelola kebijakan dalam bidang pendidikan maka berdampak pula pada semakin maju pendidikan di Malaysia dengan meningkatkan akses layanan pendidikan, sehingga pada akhirnya mutu pendidikan di Malaysia juga semakin baik dan banyaknya lembaga pendidikan yang berkualitas. Jika dulu sebelum merdeka penduduk Malaysia banyak yang bersekolah di Indonesia, namun sekarang justru jarang karena pendidikan di Malaysia semakin maju dan berkualitas.

---

<sup>28</sup> Mohd Roslan Mohd Nor dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman. *Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia (Jurnal At-Ta'dib*, Vol.6, 2011), 71.

<sup>29</sup> Tilaar, H.A.R. *Kalaedoskop Pendidikan Nasional*, 93.

## KESIMPULAN/CONCLUSION

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa politik demokrasi pendidikan antara Indonesia dengan Malaysia adalah dapat diasumsikan ketimpangan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia. Di Negara Indonesia politik kekuasaan sangat menonjol dalam mengendalikan pendidikan Islam, sedangkan di Malaysia perhatian serius pemerintah Malaysia dalam sektor pendidikan dengan berprinsip pada tujuan demokrasi pendidikan adalah mengutamakan hak asasi manusia untuk diberdayakan dan dikembangkan sesuai potensi yang dimiliki tanpa menfokuskan kepentingan politik sebagai penguasa kebijakan dalam pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Louise Anderson Allen. “*The Moral Life of Schools Revisited: Preparing Educational Leaders to ‘Build a New Social Order’ for Social Justice and Democratic Community*”, Jurnal International Journal of Urban Education Leadership: (IJUEL) Vol.1, 2006.
- Ahmad Amrullah *etal.*, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Andi Aslindah. *Pendidikan Islam di Malaysia: Jenis, Jenjang Kebijakan dan Tujuan Pendidikan*, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 18 No. 1 2015.
- Azyumardi Azra. *Rekonstruksi Kritis Ilmu dan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Endiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Ahmad Munawar Ismail et al, “*Islam dalam Pendidikan dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu di Malaysia*”, Jurnal Hadhari, *Special Edition*, 2012.
- Richard M. Ketchum. *Demokrasi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Futuh Printika, 2004.
- Hasan Langgung. *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Ahmad Syafi’i Maarif. *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Maksum. *Sejarah Madrasah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Redja Mudyahardjo. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010. Mulkhan, Abdul Munir. *Paradigma Intelektual Muslim*, Yogyakarta: Sipspress, 1993.
- Abudin Nata. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- H.A.R.Tilaar. *Kalaedoskop Pendidikan Nasional*, Jakarta: Kompas, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mohd Mohd Nor Roslan dan Wan Mohd Tarmizi Wan Othman. *Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia*, Jurnal At-Ta’dib, Vol. 6, 2011.
- M.Sirozi. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Musyrifah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.